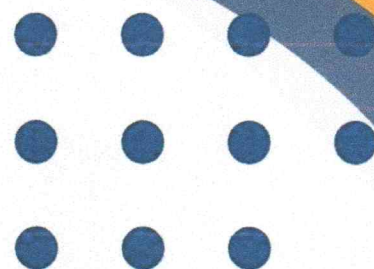


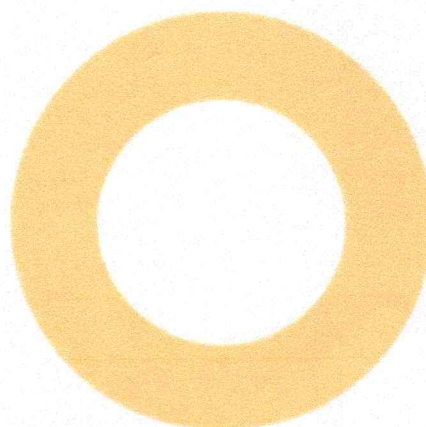


PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RENCANA KERJA 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RENJA DPMPTSP TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Tahun 2026. Penyusunan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029, serta dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2026.

Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Palu pada Tahun 2026, memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2027 yang selanjutnya akan menjadi acuan penyusunan RKA DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026.

Semoga Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara optimal guna mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025-2029 **“Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”**.

Palu, 25 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALU**



Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681028 199403 2 016

DAFTAR ISI

Halaman		
Judul		
Kata		ii
Pengantar		
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud Dan Tujuan	9
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA PALU TAHUN 2024	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Palu	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu	32
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Palu	36
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA PALU	65

	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Palu	68
	3.3 Program dan Kegiatan	72
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA PALU	92
BAB V	: PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2024	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP	32
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026	42
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2026	72
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	74
Tabel 4	Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2026	94

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah ialah Rencana Kerja (Renja). Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu merupakan salah satu Perangkat Daerah pembantu Wali Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah, DPMPTSP wajib melakukan penyusunan Renja yang digunakan untuk Tahun 2026 dengan sebutan **Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026**.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 akan dijadikan pedoman dalam menyusun program, kegiatan dan sub

kegiatan sesuai tugas dan fungsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu, Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Palu, Rencana Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Republik Indonesia, serta Rencana Kerja DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Renja DPMPTSP Kota Palu 2026 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 yang merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palu.

Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2027.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja DPMPTSP Kota Palu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
31. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
32. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
33. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
38. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 4);
39. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 12);
40. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 16).

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Palu pada Tahun 2026.

b. Tujuan

Disusunnya Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 bertujuan:

- Sinkronisasi Dokumen Perencanaan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Palu;
- Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026;
- Sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Palu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Palu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Palu
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Dan Sasaran DPMPTSP Kota Palu

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Palu
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan DPMPTSP Kota Palu

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA PALU TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Palu

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Palu. Target-target yang ditetapkan pada Renja merupakan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja pada Renstra secara bertahap. Oleh karena itu, ketercapaian target Renja pada setiap tahunnya sangat mempengaruhi keberhasilan target akhir Renstra.

Salah satu cara untuk mengetahui tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP Kota Palu. LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Evaluasi yang dilakukan ialah kinerja terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota palu Tahun 2024.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 secara kinerja menunjukkan hasil yang baik. Jika merujuk pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagian besar mencapai target 100%. DPMPTSP Kota palu menetapkan 2 Tujuan Strategis dan 2 Sasaran Strategis serta 8 Indikator Kinerja yang harus dicapai

periode Tahun 2021-2026. Tahun 2024 DPMPTSP Kota Palu dapat mencapai indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase peningkatan investasi sebesar -48.50% dari Target 5%;
- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) sejumlah 316 investor dari target 61 investor;
- Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sejumlah Rp.655.131.493.786,75 dari target Rp.405.168.750.000;
- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja rata-rata sejumlah 7 Orang/Perusahaan dari target 3 Orang/Perusahaan;
- Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN sebesar -4.84% dari Target 5%;
- Nilai Reformasi birokrasi DPMPTSP berkategori B dari Target BB;
- Indeks Kepuasan Masyarakat berkategori Sangat Baik dari Target Sangat Baik; dan
- Nilai SAKIP berkategori A dari Target BB.

Berdasarkan target dan realisasi kinerja di atas, terdapat 2 Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan. Indikator tersebut ialah Persentase peningkatan investasi sebesar -48.50% dari Target 5%, dan Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN sebesar 4,84% dari Target 5%. Hal ini disebabkan tingginya realisasi pembanding yang menggunakan realisasi investasi Tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan target Nilai Investasi Tahun 2024 sebesar Rp. 405.168.750.000, maka sesungguhnya Nilai Investasi Tahun 2024 telah melampaui target yang telah direncanakan.

Sementara itu capaian realisasi keuangan pada program, kegiatan dan sub kegiatan hanya sebesar 96,42%. Hal ini

disebabkan karena penggunaan anggaran yang sesuai kebutuhan real pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga menimbulkan selisih antara pagu anggaran dan realisasinya. Selain itu, terdapat belanja yang terealisasi secara fisik dan belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2024. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap indikator kinerja, karena kegiatan tetap terlaksana. Oleh karena itu, jika berdasarkan realisasi anggaran program, maka **Program yang tidak memenuhi target yang direncanakan** adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 96,32%;
- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan capaian 99,87%;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian 98,49%; dan
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capaian 75,07%.

Realisasi anggaran Program yang telah memenuhi target yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian 100%;
- Program Promosi Penanaman Modal dengan capaian 100%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- Perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan status perbaikan, tidak melakukan perbaikan data laporan LKPM-nya sampai dengan batas waktu tertentu, sehingga menjadikan laporan LKPM ditolak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI;

- Pelaku usaha/ Perusahaan tidak mengetahui pemberitahuan kewajiban lapor LKPM yang dikirim melalui email perusahaan/ pelaku usaha, mengakibatkan tidak melakukan laporan LKPM;
- Beberapa perusahaan/ pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil bimbingan teknis dan sosialisasi terkait LKPM oleh DPMPTSP Kota Palu;
- Indikator Ketepatan Waktu Pelayanan pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengalami penurunan disebabkan proses penerbitan rekomendasi perizinan oleh Perangkat Daerah teknis melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Palu.

Capaian target Indikator Kinerja Tahun 2024 berimplikasi terhadap target capaian sasaran Renstra DPMPTSP Kota Palu periode 2021-2026 yang tidak sesuai dengan perencanaannya atau **tidak mencapai target** yang direncanakan. Tidak tercapainya target Renja Tahun 2024 menyebabkan terhambatnya pencapaian sasaran strategis Renstra, serta turunnya nilai kinerja DPMPTSP pada LAKIP. Namun DPMPTSP Kota Palu terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu.

Oleh karena itu, untuk mendukung optimalnya capaian sasaran strategis, maka DPMPTSP Kota Palu perlu mengambil **kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran** untuk mengatasi faktor tersebut yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2026. Kebijakan/tindakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian kembali indikator kinerja dan target kinerja sesuai Renstra DPMPTSP Kota Palu;

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna menjamin tercapainya target kinerja yang direncanakan;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Palu pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
02.18. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP DPMPTSP	A	A	A	A		A	A	
2.18.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Doku men	8 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	100%	4 Doku men	16 Doku men	76%
2.18.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doku men	2 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100%	1 Doku men	4 Doku men	67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Doku men	2 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100%	1 Doku men	4 Doku men	80%
2.18.01 .2.01.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 Doku men	2 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100%	1 Doku men	4 Doku men	80%
2.18.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapor an	2 Doku men	1 Lapor an	1 Lapor an	100%	1 Lap ora n	4 Lapor an	80%
2.18.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100 %	39 %	100 %	100 %	100%	100 %	80 %	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kehuruan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 orang / bulan	71 orang / bulan	30 orang / bulan	30 orang / bulan	100%	30 orang bul an	131 orang / bulan	69%
2.18.01 .2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lapor an	2 Doku men	1 Lapor an	1 Lapor an	100%	1 Lap ora n	4 Lapor an	80%
2.18.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Lapor an	2 Doku men	1 Lapor an	1 Lapor an	100%	4 Lap ora n	7 Lapor an	140%
2.18.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemeruahan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	20 %	%	%	#DIV/0!	%	7 %	7%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01 .2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	2 Orang	Orang	Orang	#DIV/0!	Orang	2 Orang	20%
2.18.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	40 %	100 %	100 %	100%	100 %	80 %	80%
2.18.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	7 Paket	140%
2.18.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	Paket	9 Paket	45%
2.18.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	16 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	30 Paket	86%
2.18.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	3 Paket	12 Paket	120%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=[5+7+9]	11=(10 / 4)
2.18.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
2.18.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	13 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	15 Laporan	25%
2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Laporan	73 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	100%	38 Laporan	146 Laporan	83%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	40 %	%	%	#DIV/0!	%	13 %	13%
2.18.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	6 Jenis	Paket	Paket	#DIV/0!	Paket	6 Paket	60%
2.18.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	8 Unit	Unit	Unit	#DIV/0!	Unit	8 Unit	53%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	39 %	100 %	100 %	100%	100 %	80 %	80%
2.18.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lapor an	24 Lapor an	12 Lapor an	12 Lapor an	100%	12 Lap ora n	48 Lapor an	80%
2.18.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lapor an	24 Lapor an	12 Lapor an	12 Lapor an	100%	12 Lap ora n	48 Lapor an	80%
2.18.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	40 %	100 %	53 %	53%	100 %	64 %	64%
2.18.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	15 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	33 Unit	94%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pencintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
2.18.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	89 Unit	20 Unit	Unit	0%	18 Unit	107 Unit	37%
2.18.01 .2.09.0 010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	2 Unit	2 Unit	Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
2.18.01 .2.09.0 011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	70 Unit	28 Unit	11 Unit	Unit	100%	13 Unit	52 Unit	74%
02.18. 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	5 %	28 %	5 %	-48.5 %	100%	5 %	5 %	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.0 2.2.01 2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pemberian Fasilitas/ Insentif Di bidang penanaman Modal	100 %	40 %	100 %	0 %	0%	100 %	47 %	47%
02.18.0 2.2.01. 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10 Doku men	5 Doku men	2 Doku men		0%	2 Dok um en	7 Doku men	70%
02.18.0 2.2.01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	250 Kegiat an Usah a	100 Kegiat an Usah a					100 Kegiat an Usaha	40%
02.18.0 2.2.01. 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 Doku men	0	1 Doku men		0%	1 Dok um en	1 Doku men	33%
02.18.0 2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Capaian Dokumen Peta Potensi Investasi Kota Palu	100 %	40 %	100 %	%	0%	100 %	47 %	47%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.0 2.2.02. 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Doku men	0					0 Doku men	0%
02.18.0 2.2.02. 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 Doku men	0					0 Doku men	0%
02.18.0 2.2.02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	5 Doku men	2 Doku men					2 Doku men	40%
02.18.0 2.2.02. 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	3 Doku men	0	1 Doku men		0%		0 Doku men	0%
02.18. 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	305 Inves tor	423 Inves tor	61 Inves tor	316 Inves tor	100%	64 Inv est or	803 Inves tor	
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	203 0.6 Miliar 7	222 6.6 Miliar 2	405.1 Miliar 7	655.1 Miliar 3	100%	425.43 Mili ar	3307 Miliar	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelebihan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.0 3.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kota Pahu	100 %	40 %	100 %	50 %	50%	100 %	63 %	63%
2.18.03 2.01.0 1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Doku men	1 Doku men					1 Doku men	100%
02.18.0 3.2.01. 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	10 Doku men	4 Doku men	2 Doku men	1 Doku men	50%		5 Doku men	50%
02.18. 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	
02.18.0 4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	100 %	40 %	100 %	100 %	100%	100 %	80 %	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.0 4.2.01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha 100 00	Pelaku Usaha 613 3					Pelaku Usaha 6133	61%
02.18.0 4.2.01. 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha 100 00	Pelaku Usaha 613 3	Pelaku Usaha 2000	Pelaku Usaha 1207 5	604%	2000	Pelaku Usaha 2020 8	202%
02.18.0 4.2.01. 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha 100 0	Kegiatan Usaha 424					Kegiatan Usaha 424	42%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Ketuaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha 1000	Kegiatan Usaha 424	Kegiatan Usaha 200	Kegiatan Usaha 131	66%	200	755	76%
02.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang	21 Orang					21 Orang	84%
02.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Orang	21 Orang	5 Orang	Orang	0%	5 Orang	26 Orang	104%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	40 %	100 %	76 %	76%	100 %	100 %	
02.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	40 %	100 %	75.98 %	76%	100 %	72 %	72%
02.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha					0 Kegiatan Usaha	#DIV/0!
02.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	100%	4 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha	44%

Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.0 5.2.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha 175 0	Pelaku Usaha 710					Pelaku Usaha 710	41%
02.18.0 5.2.01. 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha 175 0	Pelaku Usaha 710	Pelaku Usaha 350	Pelaku Usaha 330	94%	Pelaku Usaha 120	Pelaku Usaha 1160	66%
02.18.0 5.2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha 100 0	Kegiatan Usaha 925					Kegiatan Usaha 925	93%

Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.0 5.2.01. 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha 100 0	Kegiatan Usaha 925	Kegiatan Usaha 200	Kegiatan Usaha 85	43%	48 Kegiatan Usaha	1058 Kegiatan Usaha	106%
02.18. 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %	40 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
02.18.0 6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 %	40 %	100 %	100 %	100%	100 %	80 %	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target program dan kegiatan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Kinerja s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.18.0 6.2.01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	60 Doku men	33 Doku men			8=(7/6)	9	33 Doku men	55%
02.18.0 6.2.01. 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	60 Doku men	33 Doku men	12 Doku men	15 Doku men	125%	12 Doku men	60 Doku men	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu

DPMPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar, makin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Untuk meningkatkan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional dan daerah maka kualitas tatakelola dan kinerja DPMPTSP dituntut lebih optimal dan tentu saja harus tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dari instansi maupun lembaga-lembaga lainnya. Untuk mengukur kinerja, DPMPTSP telah menetapkan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Pencapaian Kinerja DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Palu

No.	Indikator	S P M	IK K/ IK U	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat ata n An alis is
				Tah un 202 3	Tah un 202 4	Tah un 202 5	Tah un 202 6	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan investasi		IKK / IKU	5%	5%	5%	5%	33.28 %	- 48.50%	5%	5%	
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)		IKK / IKU	58	61	64	67	239	316	64	67	
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah)		IKK / IKU	385.88	405.17	425.43	446.70	1272.14	655.13	425.43	446.70	
4	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN		IKK / IKU	5%	5%	5%	5%	- 45.09 %	4.84 %	5%	5%	

No.	Indikator	SPM	IKK/IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		IKK / IKU	3	3	3	3	8	7	3	3	
6	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPSTSP			B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	B (64,19)	BB (74.03)	BB (>70-80)	A (>80-90)	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat			Baik (76,61-88,30)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (97,6)	Sangat Baik (93.53)	Sangat Baik (88,31-100)	Sangat Baik (88,31-100)	
8	Nilai SAKIP			B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	A (81,10)	A (80.46)	BB (>70-80)	A (>80-90)	

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja masih menggunakan indikator dan target Renstra DPMPSTSP Kota Palu 2021-2026;
2. Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota mulai ditargetkan pada Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan tahun awal Renstra DPMPSTSP periode 2021-2026. Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 sangat signifikan, namun tidak mencapai target pada Tahun 2024. Beberapa hal yang menyebabkan tercapainya indikator ini ialah adanya sosialisasi tata cara penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaksanakan secara berkala, serta proses pendampingan yang intens terkait penginputan pelaporan LKPM. Terjadinya penurunan pada Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa hal berikut:
 - Beberapa perusahaan wajib LKPM yang berada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tidak aktif sehingga berimbas tidak melaporkan LKPM secara rutin;

- Perusahaan yang telah melapor LKPM dengan status perbaikan, tidak melakukan perbaikan data laporan LKPM-nya sampai dengan batas waktu tertentu, sehingga menjadikan laporan LKPM ditolak oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI;
 - Pelaku usaha/ Perusahaan tidak mengetahui pemberitahuan kewajiban lapor LKPM yang dikirim melalui email perusahaan/ pelaku usaha, mengakibatkan tidak melakukan laporan LKPM;
 - Beberapa perusahaan/ pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil bimbingan teknis dan sosialisasi terkait LKPM yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
3. Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil yang baik. Rasio capaian dari tahun ke tahun telah melampaui target. Adapun penurunan yang terjadi di Tahun 2024 tidaklah signifikan karena realisasi masih dalam kategori **sangat baik**. Penurunan ini terjadi pada indikator Ketepatan Waktu Pelayanan. Mengalami penurunan disebabkan proses penerbitan rekomendasi perizinan oleh Perangkat Daerah teknis melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP;
 4. Indikator Jumlah Investor (PMA/PMDN) terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kepatuhan Investor dalam merealisasikan investasinya semakin meningkat. Karena Investor yang terdata, merupakan Investor yang telah melakukan pelaporan LKPM-nya;
 5. Indikator Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) mengalami realisasi yang berfluktuasi namun tetap melampaui dari target yang ditetapkan. Rasionalisasi Target mulai disusun kembali Tahun 2022 yang merupakan tahun awal Rensta

DPMPTSP periode 2021-2026. Penyebab terjadinya penurunan pada Tahun 2024, sama dengan penyebab turunnya capaian indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota;

6. Indikator Rasio Daya Serap Tenaga Kerja juga mulai ditargetkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Indikator ini direncanakan akan menyerap 3 Tenaga Kerja per Perusahaan yang ada di Kota Palu. Realisasi setiap tahun mengalami fluktuasi namun tetap melampaui dari target yang ditetapkan;
7. Indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN memiliki target yang sama dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota. Perbedaannya hanya terletak pada jenis data yang diolah. Indikator Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota mengolah data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan indikator Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN hanya mengolah data PMDN saja. Sehingga penyebab turunnya realisasi PMDN juga sama dengan penyebab turunnya capaian indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota.

Perlu diketahui bahwa Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang telah berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025-2029. Sehingga kinerja DPMPTSP mengalami perubahan dan penyesuaian mulai dari Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta targetnya. Namun data capaian pada Tabel 2.2 tetap menjadi acuan untuk perbaikan kinerja DPMPTSP di Tahun 2026.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Palu

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu upaya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-government*. Pelaksanaan *e-government* yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Sehubungan dengan hal tersebut DPMPTSP Kota Palu terus melakukan perbaikan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan sebagai bentuk **peningkatan kinerja dan inovasi**, diantara perbaikan tersebut yaitu:

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan **MPP** (Mal Pelayanan Publik);
- b. Proses pelayanan perizinan dikendalikan oleh Sistem Aplikasi yang berbasis teknologi informasi, *Tracking* dokumen dapat dilakukan dengan sangat mudah, Hak akses setiap petugas dipisahkan berdasarkan kewenangan, sehingga tidak memungkinkan *bypass* prosedur Pelayanan perizinan;
- c. Memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat, pemohon dapat melakukan *tracking* dokumen melalui SMS dengan cara ketik **nama** spasi **jenis izin** kirim ke **0811 450 1142**, aplikasi akan memberikan jawaban sms mengenai status terakhir proses pelayanan perizinan;
- d. Dengan penggunaan *QR-CODE* dapat memudahkan untuk mendeteksi dokumen izin yang asli atau tidak asli;
- e. Pendaftaran secara online melalui **E-SIGA** (Sistem Informasi, Pengendalian dan pelayanan), Aplikasi **OSS** (*Online Single Submission*) dan Aplikasi **SIMBG** (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung);

- f. Pendampingan proses perizinan oleh pegawai DPMPTSP untuk memudahkan Pelaku Usaha dalam penggunaan Aplikasi Perizinan;
- g. Pendampingan pelaporan LKPM oleh pegawai DPMPTSP untuk memudahkan Pelaku Usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modalnya;
- h. Tanda Tangan Elektronik untuk dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Sandi Negara/BSrE;
- i. Penerapan dan pengembangan **PIPRO** (Peta Investasi dan Promosi). Merupakan aplikasi daerah dalam bentuk peta berbasis digitasi spasial yang ditampilkan secara *realtime* dan berfungsi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan calon investor;
- j. Pelaksanaan Layanan **Inkling** (Perizinan Keliling). Merupakan pendampingan perizinan berusaha kepada masyarakat/ Pelaku Usaha di Kota Palu untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan layanan menyasar pada kantor-kantor Kelurahan maupun ruang-ruang publik yang ada di Kota Palu;
- k. Pelaksanaan Layanan **Berdasi** (Berburu Data Investasi). Merupakan upaya percepatan realisasi investasi dengan cara melakukan pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Layanan dilakukan secara langsung dengan mendatangi perusahaan-perusahaan yang telah ditargetkan.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang luas kepada penerima layanan, akan tetapi hal tersebut dalam pelaksanaannya

masih terdapat beberapa **permasalahan dan hambatan** yang ditemui, yaitu:

- a. **Kurangnya Kebijakan Daerah yang menjadi dasar penguatan investasi dan layanan perizinan dan non perizinan.** Kebijakan yang dimaksud termasuk dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi yang belum diperbarui;
- b. **Belum tersedianya dokumen proposal proyek investasi** yang siap untuk ditawarkan kepada investor;
- c. **Rendahnya sinergi lintas sektor** dalam meningkatkan investasi dan pelayanan perizinan yang cepat;
- d. **Keterbatasan kapasitas sumber daya**, baik sumber daya manusia (SDM) maupun dukungan sarana dan prasarana serta pendanaan. Keterbatasan kapasitas SDM yang dimaksud mengacu pada kondisi kebutuhan aparatur yang memiliki kompetensi pengolahan data dan pengoperasian sistem layanan berbasis TIK.

Menyikapi permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan tantangan yang harus diselesaikan sehingga tujuan akhir dari proses pelayanan dapat dicapai. Dari hasil analisa yang dilakukan masih terdapat beberapa **tantangan** yang harus diselesaikan yaitu:

- a. Beradaptasi terhadap kebijakan yang sering berubah-ubah;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan data investasi serta data potensi investasi Kota Palu;
- c. Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor;
- d. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia;
- e. Mengintegrasikan sistem pelayanan investasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih luas.

Dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas DPMPTSP Kota Palu mempunyai **peluang** untuk memberikan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat yaitu:

- a. Kota Palu sebagai wilayah strategis dan sebagai Ibu Kota Propinsi, menyediakan sarana prasarana perkotaan.
- b. Jaringan internet dan perkembangan teknologi informasi.
- c. Adanya sistem pendukung layanan investasi dan perizinan.

DPMPTSP Kota Palu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa investasi yang diizinkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Sehingga isu yang perlu dikedepankan oleh DPMPTSP, seharusnya merupakan isu yang mampu mewujudkan hal tersebut. Maka kondisi yang dikedepankan sebagai **Isu penting** DPMPTSP Kota Palu ialah sebagai berikut:

1. **Kepastian hukum dan kepatuhan lingkungan dalam perizinan.** Kondisi ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Palu dengan tetap memperhatikan pengelolaan lingkungan;
2. **Pelayanan publik yang inklusif dan digital.** Kondisi ini dapat memastikan bahwa semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat dengan tempat tinggal yang jauh, memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, serta dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penerimaan pelayanan;
3. **Data investasi, data potensi dan data perizinan yang berkualitas.** Kondisi ini dapat menyediakan data yang akurat, lengkap dan dapat diandalkan;

4. **Sumber daya pendukung Layanan yang berkualitas.**

Kondisi ini dapat mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Tahun 2026, maka DPMPTSP Kota Palu terus mengadakan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanannya. Hal ini tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan penganggaran yang memadai. Catatan penting terkait dengan kebutuhan penganggaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program 53 dan Program 35 pada Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu, yaitu pada Program *Quick Service License* dan Program *Palu Investment Forum*.
2. Penyusunan Peraturan Daerah/ Kepala Daerah/ Kebijakan Lainnya terkait Investasi dan Perizinan, seperti penyusunan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), pemutakhiran Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi, serta revisi Pendelegasian Kewenangan.
3. Penyusunan dokumen *Investment Project Ready to Offer* (IPRO), sebagai dokumen proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor.
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 yang mengamanatkan penyelenggaraan **Mal Pelayanan Publik** pada Pemerintah daerah Kota, sehingga DPMPTSP Kota Palu

memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan hal tersebut.

5. Penambahan sarana berupa peralatan kerja (komputer/ laptop, printer, kursi kerja) untuk mendukung kinerja pegawai yang saat ini masih sangat kurang.
6. Penyediaan prasarana berupa bangunan gedung kantor dan pemeliharaan bangunan untuk kenyamanan masyarakat pada saat menerima layanan.
7. Peningkatan Sistem Aplikasi Daerah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan DPMPTSP.
8. Penambahan jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dalam rangka untuk meningkatkan kompetensinya.
9. Program Promosi Penanaman Modal yang membutuhkan penambahan anggaran dalam upaya meningkatkan minat investor di Kota Palu.
10. Program Pelayanan Penanaman Modal yang membutuhkan penambahan anggaran dalam upaya percepatan pelayanan perizinannya.

Beberapa poin penjabaran tersebut diatas akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih *urgent/* mendesak. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Palu			61,643,200	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Palu			78,600,000	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5 %		OUTCOME Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	90 %		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			61,643,200	KEGIATAN Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			75,600,000	
			Terlaksananya Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan	100 %		OUTPUT Terlaksananya Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal		Capaian pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	90 %		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palu			42,895,000	SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palu			51,955,000	
	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian		Jumlah Peraturan Daerah/Prov	2	Dokumen	OUTPUT Ditetapkannya Kebijakan Daerah		Jumlah Peraturan Daerah/Prov	2	Dokumen	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3	4 Insisi dalam Pemberian Fasilitas/Ins entif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	6	7 dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	8	9 Insisi dalam Pemberian Fasilitas/Ins entif dan Kemudahan Penanaman Modal	10	11	12
2.18.0 2.2.01. 0003	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu			18,748,200	SUB KEGIATAN Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu			23,645,000	
	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		OUTPUT Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		
02.18. 02.2.0 2						KEGIATAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Palu			3,000,000	
						OUTPUT Tersedianya Peta Potensi Investasi Kota Palu		Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Palu	1 Dokumen		
2.18.0 2.2.02. 0001						SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu			1,500,000	
						OUTPUT Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum		Jumlah Peraturan Daerah	1 Dokumen		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		(Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		
2.18.0 2.2.02. 0004						SUB KEGIATAN Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Palu			1,500,000
						OUTPUT Tersusun Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1 Dok um en	
2.18.0 3						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Palu			55,327,000
						OUTCOME Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	20 Per sen	
2.18.0 3.2.01						KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu			55,327,000
						OUTPUT Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal Kota Palu		Capaian Penyelenggara an Promosi Penanaman Modal Kota Palu	1 Dok ume n	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0 3.2.01. 0002						SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu			55,327,000	
						OUTPUT Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		
2.18.0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Palu			268,899,750	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Palu			170,579,000	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik		OUTCOME Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	97 %		
2.18.0 4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			268,899,750	KEGIATAN Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			170,579,000	
			Terlaksananya Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara	100 %		OUTPUT Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang		Capaian pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara	97 %		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terpadu Satu Pintu			Menjadi Kewenangan Kota Palu		Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu		
2.18.0 4.2.01. 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu			233,558,350	SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu			129,630,000
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000		OUTPUT Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	7,400	Pelaku Usaha
2.18.0 4.2.01. 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu			23,941,400	SUB KEGIATAN Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu			29,699,000

Rancangan Awal RKPD												Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5		OUTPUT Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120								
2.18.0 4.2.01. 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu			11,400,000	SUB KEGIATAN Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Palu			11,250,000							
	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200		OUTPUT Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175								

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Palu			46,829,800	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Palu			49,005,000	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %		OUTCOME Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	95 %		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			46,829,800	KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			49,005,000	
			Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %		OUTPUT Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kota Palu		Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kota Palu	95 %		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.0 5.2.01. 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Palu			2,975,000	SUB KEGIATAN Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Palu			4,915,000	
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4		OUTPUT Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6		
2.18.0 5.2.01. 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Palu			31,519,800	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Palu			22,615,000	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha	120		OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha	120		

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya pemanfaatan dan penanaman modal		Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %		OUTCOME Meningkatnya pemanfaatannya informasi Penanaman Modal		Persentase pemanfaatan Data dan informasi Penanaman Modal	100 %	
2.18.0 6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			45,000,000	KEGIATAN Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu			60,175,000
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100 %		OUTPUT Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu		Capaian pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu	100 %	
2.18.0 6.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu			45,000,000	SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu			60,175,000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		OUTPUT Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Palu			7,036,228,687	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA OUTCOME Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	Nilai SAKIP	A 80.60	7,044,915,187	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu			5,650,000	KEGIATAN Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu			6,082,000	
			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen		OUTPUT Tersedianya dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	5 Dokumen		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
2.18.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1,075,000	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu			1,123,000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		OUTPUT Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		
2.18.0 1.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu			2,050,000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu			2,230,000	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		OUTPUT Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		
2.18.0 1.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu			2,050,000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu			2,230,000	
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1		OUTPUT Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1		

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perubahan RKA-SKPD					Perubahan RKA-SKPD		12
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu			475,000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu			499,000
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		OUTPUT Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu			5,077,921,387	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Palu			5,078,521,387
			Persentase realisasi keuangan	95 %		OUTPUT Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola	95 %	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu			5,077,271,387	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu				
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		OUTPUT Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu			325,000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu			475,000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu			325,000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu			775,000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 Laporan		OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 Laporan		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	4 Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	6	7 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	9 Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	11	12
2.18.0 1.2.05						KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu			19,870,000	
						OUTPUT Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikelola	100 %		
2.18.0 1.2.05. 0011						SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu			19,870,000	
						OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		
2.18.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu			385,766,000	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Palu			533,685,000	

Hasil Analisa Kebutuhan											Cata tan Pent ing
Rancangan Awal RKPD					Kebutuhan						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuha n Dana (RP.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %		OUTPUT Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola	100 %		
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu			1,550,500	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palu			1,554,800	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		OUTPUT Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu			99,492,700	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Palu			99,584,200	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		OUTPUT Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu			18,201,600	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palu			18,700,000	
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan	3 Paket		OUTPUT Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan	4 Paket		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengandaan yang Disediakan					Pengandaan yang Disediakan			
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu			5,600,000	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Palu			5,600,000	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	OUTPUT Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu			3,919,200	SUB KEGIATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu			3,925,000	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu			257,002,000	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu			404,321,000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39	Laporan	OUTPUT Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41	Laporan	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.07						KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu			18,500,000	
						OUTPUT Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %		
2.18.01.2.07.0011						SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu			18,500,000	
						OUTPUT Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu			904,167,200	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu			740,514,800	
			Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %		OUTPUT Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 %		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	355,900,000	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	355,900,000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	548,267,200	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	384,614,800	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	662,724,100	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	647,742,000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang dipelihara			
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu			576,300,000	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Palu			566,900,000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit		OUTPUT Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit		
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu			29,300,000	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palu			25,300,000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	1 Unit		OUTPUT Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	1 Unit		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target - Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu			24,260,000	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palu			24,260,000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit		
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu			24,934,100	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu			23,352,000	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu			7,930,000	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palu			7,930,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat merupakan bagian penting untuk menampung usulan-usulan masyarakat terkait kebutuhan dan harapan terhadap program prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Pada Tahun 2026 DPMPTSP Kota Palu tidak mendapatkan usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Palu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA PALU

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)* 2025-2029, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengambil peran pada **Prioritas Nasional 02** “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara yang Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, dan **Prioritas Nasional 05** “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor”. Selanjutnya turun pada **Program Prioritas 02.22** Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru, **Program Prioritas 05.01** Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor, dan **Program Prioritas 05.04** Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Dengan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. **Kegiatan Prioritas 02.22.03** Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan;
2. **Kegiatan Prioritas 02.22.04** Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut;
3. **Kegiatan Prioritas 05.01** Pengembangan Hilirisasi 11 Komoditas;
4. **Kegiatan Prioritas 05.04.01** Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi;
5. **Kegiatan Prioritas 05.04.02** Peningkatan Investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global;

6. **Kegiatan Prioritas 05.04.03** Peningkatan Investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik.

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029 memuat visi **“Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045”** dengan misi **“Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”**. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan **“Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan”** sebagai tujuan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan **sasarannya** sebagai berikut:

- Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata; dan
- Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan 3 **Arah kebijakan** sebagai berikut:

1. Akselerasi Peningkatan Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas Penanaman Modal dan Hilirisasi Investasi Strategis Guna Mewujudkan Pencapaian Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata;
2. Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal;

3. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Penanaman Modal untuk Memperkuat Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025-2029 memuat **Visi Kota Palu** Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif”**. Visi ini akan ditempuh dengan empat **misi** pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2025-2030, yaitu:

1. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing;
2. Meningkatkan akselerasi pengelolaan lingkungan dan penataan kota yang layak huni;
3. Meningkatkan akselerasi transformasi sosial dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas;
4. Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional.

Merujuk uraian Visi Misi Kota Palu Tahun 2025-2029 tersebut, DPMPTSP akan menyasar pada **Misi 1** dan **Misi 4** yang dianggap relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP. **Misi 1** memuat **Tujuan T.1** terwujudnya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan bisnis yang produktif dan berdaya saing, dengan **Sasaran S.1.2** meningkatnya nilai investasi, kemudahan berusaha, dan daya saing daerah. Sedangkan **Misi 4** memuat **Tujuan T.4** terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, dan profesional, dengan **Sasaran S.4.4** meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2030 disusun dengan **prinsip harmonisasi dan integrasi** terhadap

kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan tujuan ini memperhatikan secara cermat dokumen perencanaan tingkat nasional, seperti RPJMN 2025–2029 serta visi, misi, dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Di tingkat regional, RPJMD Kota Palu juga **disinergikan** dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta **9 Program Prioritas BERANI** yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Renstra DPMPTSP Kota Palu Tahun 2025–2029 juga akan **disinergikan** dengan Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Dalam upaya mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menyasar **Berani Harmoni** sebagai salah satu Program Prioritas Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Berani Harmoni dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah melalui **Berani Berinvestasi** dan **Berani Bermitra**. **Berani Berinvestasi** ialah mempermudah proses investasi dengan layanan cepat, transparan dan berbasis digital; memberikan kepastian hukum dan regulasi; menawarkan investasi menarik bagi investor; meningkatkan promosi – memberikan insentif kepada pelaku usaha, mengarahkan untuk investasi hijau dan investasi biru. **Berani Bermitra** dilaksanakan dalam rangka mendukung UMKM untuk naik kelas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Palu

Merujuk dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Tahun 2025-2029, Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kota Palu Tahun 2025-2029, maka DPMPTSP Kota

Palu menetapkan “**Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif**” sebagai **Tujuan Renstra Tahun 2025-2029**. Iklim Investasi yang Kompetitif dapat dimaknai dengan kondisi yang mendorong kemudahan, kepastian, dan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, melalui penyederhanaan regulasi, pelayanan yang cepat dan transparan.

Kemudahan Investasi yang dimaksud berupa penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan. Investor dapat memanfaatkan layanan digital yang difasilitasi DPMPTSP. Investor cukup mengakses aplikasi Perizinan online, tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor teknis perizinan, dimana semua proses perizinan lintas dinas dikoordinir oleh DPMPTSP. Investor juga bisa mendapatkan pendampingan teknis terkait tata cara mengakses layanan digital perizinan. Penyederhanaan regulasi diwujudkan dalam bentuk penghapusan atau penyatuan izin yang tumpang tindih agar tidak bertentangan dengan Aturan yang ada pada Pemerintah Pusat.

Kepastian Investasi yang dimaksud berupa regulasi daerah terkait investasi yang tidak berubah-ubah, proses perizinan yang sesuai standar, serta fasilitasi pelaporan LKPM bagi Investor. Hal ini merupakan bentuk jaminan Pemerintah Daerah, agar investor merasa aman, terlindungi, serta memperoleh perlakuan adil selama proses dan masa operasi usahanya.

Daya Tarik Investor diwujudkan dalam bentuk ketersediaan potensi daerah dan peluang usaha, **pengurangan/ keringanan/ pembebasan pajak/ retribusi daerah, pemberian bantuan modal**, ketersediaan infrastruktur Pendukung, ketersediaan tenaga kerja berkualitas, serta lingkungan yang aman bagi operasional usaha.

Rumusan Tujuan Renstra DPMPTSP juga disesuaikan dengan Urusan Penanaman Modal yang termuat pada Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri ini juga memuat **indikator tujuan**, yaitu **“Persentase Peningkatan Investasi”**. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Persentase Peningkatan Investasi diperoleh dengan menggunakan rumus **“jumlah investasi tahun n dikurang jumlah investasi tahun n-1, dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1, dikali 100%”**. Jumlah investasi yang dimaksud ialah jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu.

Untuk mencapai indikator tujuan tersebut, maka diperlukan rumusan sasaran yang tepat. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/ aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Dalam mencapai tujuan Renstra Tahun 2025-2029, **DPMPTSP menetapkan 2 Sasaran**, yaitu:

-  **Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif**
-  **Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel**

Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif merupakan sasaran langsung untuk mencapai tujuan Renstra DPMPTSP Tahun

2025-2029. Sasaran ini ditandai dengan bertambahnya nilai atau jumlah dana yang benar-benar telah ditanamkan oleh investor di wilayah Kota Palu baik modal dalam negeri/ PMDN maupun modal asing/ PMA. **Indikator** yang digunakan ialah **Nilai Realisasi Investasi** yang bersumber dari pengolahan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi laporan wajib bagi Investor. Pelaporan LKPM berpedoman pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nilai Realisasi Investasi yang dimaksud ialah jumlah yang telah direalisasikan oleh investor dalam satuan rupiah di wilayah Kota Palu.

Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel ditandai dengan kondisi investor/ masyarakat yang semakin puas terhadap kualitas layanan yang diberikan. **Indikator** yang digunakan ialah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan** yang bersumber dari pengolahan data survei kepuasan masyarakat. Pelaksanaan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 kemudian menjadi Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Tahun 2026 dengan target dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP
Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2026
1	2	3	4	5
Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi	$\frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi Tahun } n-1)}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1} \times 100\%$	15 (Persen)
	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Nilai realisasi investasi	$\frac{\text{Realisasi Investasi}}{\text{Target Investasi}} \times 100\%$	PMDN 65 – 75 PMA 25 - 35 (Persen)
	Terwujudnya pelayanan perizinan yang akuntabel	IKM terhadap Layanan Perizinan	Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	98.00 (Poin)

Indikator dan target sasaran yang termuat pada tabel 3.2, sekaligus juga merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk DPMPTSP Tahun 2026**.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPMPTSP Tahun 2026 ialah sebagai berikut:

1. Visi Kota Palu Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya Kota Palu Mantap Berkelanjutan, yang Akseleratif, Inovatif, dan Kolaboratif;
2. Misi 1 Kota Palu Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta pengembangan dunia bisnis yang berdaya saing;
3. Misi 4 Kota Palu Tahun 2025-2029 yaitu Memantapkan inovasi dan kolaborasi dalam tata kelola pemerintah yang profesional;

4. 53 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu yaitu *Quick Service License*;
5. 35 Program Pembangunan Daerah Kota Palu yaitu *Palu Investment Forum*;
6. Target IKU DPMPTSP Tahun 2026;
7. Target IKK DPMPTSP Tahun 2026;
8. Penyelarasan dengan dokumen RKPD Tahun 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Palu yang direncanakan pada tahun 2026 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 34 sub kegiatan. Sedangkan rencana Tahun 2027 terdiri dari 6 program, 15 kegiatan, dan 41 sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam wilayah Kota Palu dengan pagu 7.458.601.187 yang bersumber dari Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2026. Pagu ini masih bersifat indikatif, sehingga jika terjadi perubahan pada ketersediaan pagu tersebut maka akan dilakukan penyesuaian terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta target indikatornya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTP Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Palu		7,458,601,187	APBD			8,058,299,185
2.18	BIDANG PEMERINTAHAN MODAL		Kota Palu		7,458,601,187	APBD			8,058,299,185
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Kota Palu		78,600,000	APBD	Program Wajib		315,000,000
	OUTCOME Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi		90 %				90 %	
2.18.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		75,600,000	APBD			125,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Capaian pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal		90 %				90 %	
2.18.02.2.01.0001	SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kota Palu		51,955,000	APBD			75,000,000
	OUTPUT Ditetapkannya Kebijakan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi		2	Dokumen			1	Dokumen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2. Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4	5	6	7	8	9	10
2.18.0 2.2.01. 0003	SUB KEGIATAN Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Kota Palu		23,645,000	APBD			50,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		1 Dokumen				1 Dokumen	
02.18. 02.2.0 2	KEGIATAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				3,000,000	APBD			150,000,000
	OUTPUT Tersedianya Peta Potensi Investasi Kota Palu	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Palu		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.18.0 2.2.02. 0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		1,500,000	APBD			50,000,000
	OUTPUT Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		1 Dokumen				Dokumen	
2.18.0 2.2.02. 0004	SUB KEGIATAN Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Kota Palu		1,500,000	APBD			100,000,000
	OUTPUT Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		1 Dokumen				1 Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.0 2.3.03	KEGIATAN Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur					APBD			20,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Capaian pelaksanaan Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur						1	Badan Usaha
2.18.0 2.3.03. 0001	SUB KEGIATAN Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam		Kota Palu			APBD			20,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan						1	Badan Usaha
2.18.0 2.3.04	KEGIATAN Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/ Kota					APBD			20,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kota Palu	Capaian pelaksanaan Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi						1	Badan Usaha

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Strategis di Wilayah Kota Palu							
2.18.0 2.3.04. 0001	SUB KEGIATAN Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota		Kota Palu			APBD			20,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota						1	Badan Usaha
2.18.0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Kota Palu		55,327,000	APBD	Program Wajib		131,060,179
	OUTCOME Meningkatkan Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		20 Persen				20 Persen	
2.18.0 3.2.01	KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu		55,327,000	APBD			131,060,179
	OUTPUT Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal Kota Palu	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kota Palu		1 Dok.				2 Dok.	
2.18.0 3.2.01. 0002	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu		55,327,000	APBD			81,060,179
	OUTPUT Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dok.				1 Dok.	
2.18.0 3.2.01. 0003	SUB KEGIATAN Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palu			APBD			50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OUTPUT Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota						1 Dok.	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Kota Palu		170,579,000	APBD	Program Wajib		220,000,000
	OUTCOME Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		97 %				97 %	
2.18.04.2.01	KEGIATAN Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		170,579,000	APBD			220,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu	Capaian pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu		97 %				97 %	
2.18.04.2.01.0006	SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Kota Palu		129,630,000	APBD			150,000,000
	OUTPUT Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan		7,400 Pelaku Usaha				7,800 Pelaku Usaha	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
2.18.0 4.2.01. 0007	SUB KEGIATAN Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Kota Palu		29,699,000	APBD			50,000,000
	OUTPUT Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha 120				Pelaku Usaha 130	
2.18.0 4.2.01. 0008	SUB KEGIATAN Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Kota Palu		11,250,000	APBD			20,000,000
	OUTPUT Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berbasis risiko Lintas Daerah		Pelaku Usaha 175				Pelaku Usaha 175	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha							
2.18.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Kota Palu		49,005,000	APBN/ APBD	Program Wajib		140,000,000
	OUTCOME Terkendalanya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		95 %				95 %	
2.18.0 5.2.01	<i>KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Kota Palu</i>		<i>49,005,000</i>	<i>APBN/ APBD</i>			<i>140,000,000</i>
	<i>OUTPUT Terkendalanya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu</i>	<i>Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu</i>		<i>95 %</i>				<i>95 %</i>	
2.18.0 5.2.01. 0004	SUB KEGIATAN Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Kota Palu		4,915,000	APBN/ APBD			20,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi yang dihadapi Pelaku Usaha		6 Keg. Usaha				12 Keg. Usaha	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							
2.18.0 5.2.01. 0005	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Kota Palu		22,615,000	APBN/ APBD			60,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		120 Pelaku Usaha				120 Pelaku Usaha	
2.18.0 5.2.01. 0006	SUB KEGIATAN Pengawasan Penanaman Modal		Kota Palu		21,475,000	APBN/ APBD			60,000,000
	OUTPUT Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian		48 Keg. Usaha				96 Keg. Usaha	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kota Palu	100 %	60,175,000	APBD	Program Wajib		66,794,250
	OUTCOME Meningkatnya pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan Data dan informasi Penanaman Modal		100 %				100 %	
2.18.06.2.01	KEGIATAN Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		60,175,000	APBD			66,794,250
	OUTPUT Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu	Capaian pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu		100 %				100 %	
2.18.06.2.01.0002	SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kota Palu		60,175,000	APBD			66,794,250
	OUTPUT Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan		12 Dokumen				12 Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2 Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	5	6	7	8	9	10
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Kota Palu		7,044,915,187	APBD	Program Penunjang		7,185,444,756
	OUTCOME Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		A 80.60				A 80.70	
2.18.01.2.01	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palu		6,082,000	APBD			6,386,100
	OUTPUT Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen			5 Dokumen		
2.18.01.2.01.0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Palu		1,123,000	APBD			1,179,150
	OUTPUT Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen			2 Dokumen		
2.18.01.2.01.0002	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Palu		2,230,000	APBD			2,341,500
	OUTPUT Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dokumen			1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Kota Palu	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01.0003	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Palu		2,230,000	APBD			2,341,500
	OUTPUT Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen				1 Dokumen	
2.18.01.2.01.0006	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Palu		499,000	APBD			523,950
	OUTPUT Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan				1 Laporan	
2.18.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palu		5,078,521,387	APBD			5,108,001,806
	OUTPUT Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola		95 %				100 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.0 1.2.02. 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Palu		5,077,271,387	APBD			5,106,689,306
	OUTPUT Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/ bulan				56 Orang/ bulan	
2.18.0 1.2.02. 0005	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Palu		475,000	APBD			498,750
	OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan				1 Laporan	
2.18.0 1.2.02. 0007	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Palu		775,000	APBD			813,750
	OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan				1 Laporan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.0 1.2.05	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palu		19,870,000	APBD			20,863,500
	OUTPUT Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikelola		100 %				100 %	
2.18.0 1.2.05. 0011	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Kota Palu		19,870,000	APBD			20,863,500
	OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		2 Orang				2 Orang	
2.18.0 1.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palu		533,685,000	APBD			560,369,250
	OUTPUT Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola		100 %				100 %	
2.18.0 1.2.06. 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Kota Palu		1,554,800	APBD			1,632,540
	OUTPUT Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket				2 Paket	
2.18.0 1.2.06. 0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Palu		99,584,200	APBD			104,563,410

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OUTPUT Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket				7 Paket	
2.18.0 1.2.06. 0005	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Palu		18,700,000	APBD			19,635,000
	OUTPUT Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket				4 Paket	
2.18.0 1.2.06. 0006	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Palu		5,600,000	APBD			5,880,000
	OUTPUT Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2 Dok.				2 Dok.	
2.18.0 1.2.06. 0008	SUB KEGIATAN Fasilitas Kunjungan Tamu		Kota Palu		3,925,000	APBD			4,121,250
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Lap.				1 Lap.	
2.18.0 1.2.06. 0009	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Palu		404,321,000	APBD			424,537,050
	OUTPUT Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		41 Lap.				41 Lap.	
2.18.0 1.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah		Kota Palu		18,500,000	APBD			50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10
	OUTPUT Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 %				100 %	
2.18.0 1.2.07. 0002	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu			APBD			20,000,000
	OUTPUT Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	
2.18.0 1.2.07. 0005	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel		Kota Palu			APBD			5,000,000
	OUTPUT Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1 Unit	
2.18.0 1.2.07. 0006	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Palu			APBD			5,000,000
	OUTPUT Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1 Unit	
2.18.0 1.2.07. 0010	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Palu			APBD			10,000,000
	OUTPUT Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan						1 Unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lainnya yang Disediakan							
2.18.01.2.07.0011	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Palu		18,500,000	APBD			10,000,000
	OUTPUT Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit				1 Unit	
2.18.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palu		740,514,800	APBD			759,695,000
	OUTPUT Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 %				100 %	
2.18.01.2.08.0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Palu		355,900,000	APBD			373,695,000
	OUTPUT Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan				12 Laporan	
2.18.01.2.08.0004	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Palu		384,614,800	APBD			386,000,000
	OUTPUT Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 Laporan				12 Laporan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kantor yang Disediakan							
2.18.0 1.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palu		647,742,000	APBD			680,129,100
	OUTPUT Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %				100 %	
2.18.0 1.2.09. 0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Palu		566,900,000	APBD			595,245,000
	OUTPUT Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit				11 Unit	
2.18.0 1.2.09. 0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu		25,300,000	APBD			26,565,000
	OUTPUT Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit				2 Unit	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09.0006	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Palu		24,260,000	APBD			25,473,000
	OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34 Unit				35 Unit	
2.18.01.2.09.0010	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Palu		23,352,000	APBD			24,519,600
	OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit				2 Unit	
2.18.01.2.09.0011	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Palu		7,930,000	APBD			8,326,500
	OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		14 Unit				15 Unit	
					7,458,601,187				8,058,299,185

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA PALU

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu sesuai dengan usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi, dengan pagu indikatif sebesar **78.600.000**

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan promosi penanaman modal, dengan pagu indikatif sebesar **55.327.000**

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko, dengan pagu indikatif sebesar **170.579.000**

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal, dengan pagu indikatif sebesar **49.005.000**

5) Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal, dengan pagu indikatif sebesar **60.175.000**

6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini merupakan program penunjang yang bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja pelayanan DPMPTSP, dengan pagu Indikatif sebesar **7.044.915.187**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Tahun 2026 juga telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4
Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPSTSP Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Palu		7,458,601,187	APBD	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Kota Palu		7,458,601,187	APBD	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Kota Palu		78,600,000	APBD	Program Wajib
	OUTCOME Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi		90 %			
2.18.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		75,600,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Capaian pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal		90 %			
2.18.02.2.01.0001	SUB KEGIATAN Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Kota Palu		51,955,000	APBD	
	OUTPUT Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		2 Dokumen			
2.18.02.2.01.0003	SUB KEGIATAN Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		23,645,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/ PMDN) dengan UMKM di daerah		1 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
02.18.02.2.02	KEGIATAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				3,000,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Peta Potensi Investasi Kota Palu	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Kota Palu		1 Dokumen			
2.18.02.2.02.0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu		1,500,000	APBD	
	OUTPUT Tersusnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen			
2.18.02.2.02.0004	SUB KEGIATAN Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Kota Palu		1,500,000	APBD	
	OUTPUT Tersusnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Kota Palu	20 Persen	55,327,000	APBD	Program Wajib
2.18.03.2.01	KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu		55,327,000	APBD	
	OUTPUT Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal Kota Palu	Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kota Palu		1 Dok.			
2.18.03.2.01.0002	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Kota Palu		55,327,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dok.			
2.18.03.2.01.0003	SUB KEGIATAN Penyusunan Strategi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Palu			APBD	
	OUTPUT Tersusnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		Dok.			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Kota Palu		170,579,000	APBD	Program Wajib

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	OUTCOME Meningkatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		97 %			
2.18.04.2.01	KEGIATAN Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		170,579,000	APBD	
	OUTPUT Tertaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Kota Palu	Capaian pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Kota Palu		97 %			
2.18.04.2.01.0006	SUB KEGIATAN Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Kota Palu		129,630,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		7,400 Pelaku Usaha			
2.18.04.2.01.0007	SUB KEGIATAN Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Kota Palu		29,699,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		120 Pelaku Usaha			
2.18.04.2.01.0008	SUB KEGIATAN Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Kota Palu		11,250,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha		175 Keg. Usaha			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Kota Palu		49,005,000	APBN / APBD	Program Wajib

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	OUTCOME Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		95 %			
2.18.05.2.01	KEGIATAN Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		49,005,000	APBN/ APBD	
	OUTPUT Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu	Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Palu		95 %			
2.18.05.2.01.0004	SUB KEGIATAN Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Kota Palu		4,915,000	APBN/ APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		6 Keg. Usaha			
2.18.05.2.01.0005	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Kota Palu		22,615,000	APBN/ APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		120 Pelaku Usaha			
2.18.05.2.01.0006	SUB KEGIATAN Pengawasan Penanaman Modal		Kota Palu		21,475,000	APBN/ APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		48 Keg. Usaha			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Kota Palu		60,175,000	APBD	Program Wajib

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1		3	4	5	6	7	8
	OUTCOME Meningkatkan pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan Data dan informasi Penanaman Modal		100 %			
2.18.06.2.01	KEGIATAN Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Palu		60,175,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu	Capaian pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kota Palu		100 %			
2.18.06.2.01.000 2	SUB KEGIATAN Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Kota Palu		60,175,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		12 Dokumen			
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kota Palu		7,044,915,187	APBD	Program Penunjang
	OUTCOME Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		A 80.60			
2.18.01.2.01	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Palu		6,082,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen			
2.18.01.2.01.000 1	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Palu		1,123,000	APBD	
	OUTPUT Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.01.2.01.000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kota Palu		2,230,000	APBD	
2	OUTPUT Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen			
2.18.01.2.01.000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Palu		2,230,000	APBD	
3	OUTPUT Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen			
2.18.01.2.01.000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Palu		499,000	APBD	
6	OUTPUT Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan			
2.18.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kota Palu		5,078,521,387	APBD	
	OUTPUT	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola		95 %			
2.18.01.2.02.000	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Palu		5,077,271,387	APBD	
1	OUTPUT Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan			
2.18.01.2.02.000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Palu		475,000	APBD	
5	OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan			
2.18.01.2.02.000	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Kota Palu		775,000	APBD	
7							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	OUTPUT Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan			
2.18.01.2.05	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Palu		19,870,000	APBD	
	OUTPUT Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikelola		100 %			
2.18.01.2.05.001	SUB KEGIATAN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Palu		19,870,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang			
2.18.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Palu		533,685,000	APBD	
	OUTPUT Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola		100 %			
2.18.01.2.06.000	SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor		Kota Palu		1,554,800	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2 Paket			
2.18.01.2.06.000	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Palu		99,584,200	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket			
2.18.01.2.06.000	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kota Palu		18,700,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket			
2.18.01.2.06.000	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Palu		5,600,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.01.2.06.0008	OUTPUT Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dok.			
2.18.01.2.06.0009	SUB KEGIATAN Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 Lap.	3,925,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	41 Lap.	404,321,000	APBD	
2.18.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palu		18,500,000	APBD	
2.18.01.2.07.0011	OUTPUT Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 %			
	SUB KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 Unit	18,500,000	APBD	
2.18.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palu		740,514,800	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100 %			
2.18.01.2.08.0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Palu		355,900,000	APBD	
2.18.01.2.08.0004	OUTPUT Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan			
	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Palu		384,614,800	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	OUTPUT Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan			
2.18.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kota Palu		647,742,000	APBD	
	OUTPUT Terpilihannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		100 %			
2.18.01.2.09.0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Palu		566,900,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit			
2.18.01.2.09.0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Palu		25,300,000	APBD	
	OUTPUT Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit			
2.18.01.2.09.0006	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Palu		24,260,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		34 Unit			
2.18.01.2.09.0010	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Palu		23,352,000	APBD	
	OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 Unit			
2.18.01.2.09.0011	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana		Kota Palu		7,930,000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	4	5	6	7	8
	OUTPUT Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		14 Unit			
					7,458,601,187		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan target-target yang ada. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap anggaran serta melakukan penyesuaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran strategis DPMPTSP Kota Palu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

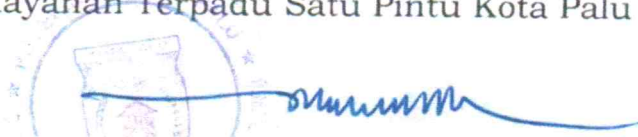
1. Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Palu 2025-2029;
2. Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026;
3. Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026 menjadi acuan dalam mengevaluasi kinerja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian Renja DPMPTSP Kota Palu Tahun 2026, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna menjamin tercapainya target kinerja yang direncanakan.

Palu, 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu



Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681028 199403 2 016

LAMPIRAN



KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 500.16 / 442 / Dpm PTSP / 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu dibentuk tim penyusun;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

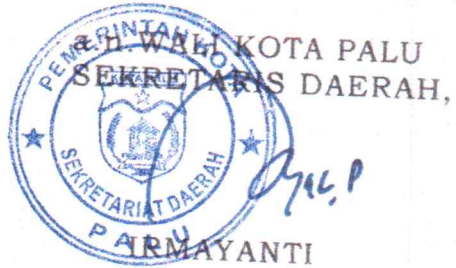
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Ketua:
memimpin tim dalam merumuskan rencana kerja, menjalin komunikasi dan koordinasi antara berbagai unit kerja, serta melakukan pemantauan dan evaluasi progres penyusunan dokumen rencana kerja;
 - b. Sekretaris:
mengelola administrasi, dokumentasi, dan memastikan kelancaran proses penyusunan dokumen sesuai dengan rencana;
 - c. Koordinator Kelompok Kerja:
memimpin dan mengarahkan kelompok kerja dalam menyusun rencana kerja, memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaan tugas dalam kelompok kerja; dan
 - d. Anggota:
mengumpulkan data dan informasi serta menyusun dokumen rencana kerja sesuai tahapan.
- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 06 Maret 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 500.16/442/Dpmptisp/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PALU TAHUN 2026

- I. Ketua : Dra. Irmawati Alkaf, M.Si (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
- II. Sekretaris : Makmur, S.Sos (Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
- III. Koordinator Kelompok Kerja :
1. Drs. Yabidi, M.Si (Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
 2. Robi, S.Sos (Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Potensi dan Promosi Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
 3. Sandra Lamaming, S.H., M.M (Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
 4. Risdianto, S.H., M.H (Kepala Bidang Sistem Informasi, Regulasi, dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
- IV. Anggota :
1. Husnaeni, S.E (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
 2. Kasmawati, S.H., M.Si NIP. 19751001 199903 2 005 (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)

3. Muzani, S.Sos., M.A.P NIP. 19731007 200212 2 003 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
4. Riamanti Esra Unso, S.Sos., M.M NIP. 19730327 199903 2 009 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
5. Rowena Ch. Lesnusa, S.Sos NIP. 19691124 199403 2 011 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
6. Moh. Sofyan, S.E NIP. 19720302 200107 1 001 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
7. Nur Irma, S.E NIP. 19720328 200801 2 010 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
8. Ratih Indah Permatasari, S.E., M.M NIP. 19870123 201101 2 007 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
9. Arif Richard Ali, S.E NIP. 19861027 200501 1 005 (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)
10. Mohammad Arief, S.H., M.M NIP. 19860208 201101 1 011 (Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu)

